

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unpar Press, Bandung, 2017.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.

Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang PRESSindo, Jember, 2016.

Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Depok, 2008.

H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Hengki Andora, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah, Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Julius Sembiring, *Tanah Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Wolter Kluwer, Alphen 2012.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Salim H. S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

S. Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah*, Pustaka Bangsa, Medan, 2006.

Soedjarwo Soeromihardjo, *Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009.

Soejono, Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

b. Disertasi :

Hengki Andora, “*Penguasaan dan Pengelolaan Tanah oleh Instansi Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)*”, Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

c. Peraturan Perundang-undangan :

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Keterangan Rencana Kota

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan.

d. Jurnal :

Arnidar Harahap, Analisa Konsep Aturan Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia, *Arbiter : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Universitas Medan Area Vol. 5 No. 1, 2023*, hlm 176.

Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi Vol. 19, No.2, 2022*, hlm. 278.

Hasanah, Legalitas Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah, *e-Journal Universitas Riau Vol. 2 No. 1, 2015*, hlm. 146.

Sidik, Paundra. Amankan Tanah Negara, Pemerintah Terapkan *Substance Over Form*, *Indonesia Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 2, 2023*, hlm. 153.

Untung Dwi Hananto, “Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40 No. 2, 2015*, hlm 208.

Urip Santoso, 2013, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 188.

e. **Website :**

Admin, “Barang Milik Daerah”, <https://jdih.padang.go.id>, dikunjungi pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.41 WIB.

Admin, “Gambaran Umum Kota Padang”, <https://padang.go.id>, dikunjungi pada tanggal 6 Agustus 2023 pukul 10.21 WIB.

Admin, “Kewarganegaraan Ganda Bagi WNI dibawah 18 Tahun”, <https://kemlu.go.id>, dikunjungi pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.35 WIB.

Admin, “Sekilas Tentang BPKAD Kota Padang”, <https://bpkad.padang.go.id>, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 15.18 WIB.

Admin, “Sejarah Kota Padang”, <https://padang.go.id>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 07.51 WIB.

Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 20.11 WIB.

f. **Sumber lainnya :**

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang dengan Kantor Pertanahan Kota Padang tentang Pensertipikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Padang